

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan tentunya dituntut untuk menyajikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pengguna. Laporan keuangan pada perusahaan sangat dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Adapun pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah investor, karyawan, debitur, kreditur usaha, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan.

Globalisasi pasar keuangan yang terjadi saat ini menuntut perusahaan untuk menyajikan pelaporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Pelaporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi perusahaan dan sistem pelaporan eksternal, yang mengukur dan secara rutin mengungkapkan hasil audit, data kuantitatif terkait dengan posisi keuangan dan performa perusahaan (Abriyanti 2022). Laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kondisi finansial dan ekonomi perusahaan tersebut. Pelaporan keuangan harus dapat menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, menyajikan informasi mengenai prestasi perusahaan dalam satu periode, dan menyediakan informasi-informasi yang dapat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan agar mereka dapat mengambil keputusan. Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa

lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2022 Paragraf 9 memaparkan pengertian laporan keuangan yang berbunyi laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pengambilan keputusan terkait operasional entitas atau organisasi, salah satu entitas yang sangat penting memiliki laporan keuangan yang berkualitas adalah lembaga keuangan lokal yang berasal dari Bali, yakni Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah suatu badan perekonomian desa yang berfungsi sebagai suatu wadah penyimpanan dana, penyaluran kredit, serta sumber pendanaan dalam rangka suatu pembangunan desa yang ada di Bali. Lembaga perkreditan desa pertama kali didirikan pada tahun 1985, keberadaan lembaga perkreditan desa merupakan lembaga keuangan milik komunitas masyarakat hukum adat Bali yang diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah, dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa lembaga perkreditan desa tidak diatur oleh pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya. Pembentukan lembaga perkreditan desa dilatar belakangi oleh terbatasnya modal dan permodalan yang dimiliki oleh krama desa adat

yang dapat menjangkau kredit-kredit kecil yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan usahanya (Abriyanti, 2022).

Perkembangan LPD di pedesaan memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat menciptakan kesempatan kerja, dan pendapatan melalui penciptaan pengembangan usaha mikro. Keberadaan Lembaga perkreditan desa di Kecamatan Ubud tersebut sangat membantu masyarakat salah satunya untuk permodalan dalam usaha, karena dari segi ekonomi masyarakat di Ubud lebih cenderung bergerak dalam usaha perdagangan. Wilayah Kecamatan Ubud terdiri dari 32 LPD. Selain itu, perkembangan LPD di Kecamatan Ubud sangat berkembang maka sistem informasi akuntansi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan untuk pemroses data transaksi yang lebih cepat, akurat dan tepat waktu sehingga LPD di Kecamatan Ubud mampu menghadapi persaingan yang telah cukup ketat (Abriyanti, 2022). Sebagai lembaga keuangan mikro yang telah berkembang pesat di Bali, terutama pada jumlah LPD di Bali yang terdapat 1.433 LPD dengan total asset sebesar Rp 25 triliun per 31 Desember 2022 (Beritabali.com, 2022).

Menurut Hani (2018:88) definisi pengungkapan (*disclosure*) merupakan bagian dari pelaporan keuangan, yaitu langkah paling akhir dari proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk *financial statement*. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai suatu tujuan Lembaga perkreditan Desa yaitu dengan pengungkapan dan penyusunan sebuah laporan yang berkualitas seperti dibutuhkannya beberapa faktor yang mendukung pengungkapan dan penyusunannya. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang berisikan informasi yang bersifat keuangan.

Kualitas laporan keuangan lembaga perkreditan desa dikatakan baik jika kinerja keuangan lembaga perkreditan desa pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan maupun manajemen yang dilakukan berpredikat “Sehat”. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali tidak hanya memiliki asset yang begitu besar, disamping itu lembaga perkreditan desa di Bali telah mengalami kondisi yang tidak diinginkan seperti ditemukan kondisi LPD yang tidak sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan macet, lebih parah nya ada LPD yang tidak beroperasi (Bisnis.com, 2021).

LPD sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan di desa adat memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja lembaga perkreditan desa melalui laporan keuangan yang dilaporkan kepada LPLPD sebagai badan pengawas lembaga perkreditan desa di masing-masing kabupaten dan kota. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. LPD juga melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kerangka penyusunan laporan keuangan dan sudah tercermin pada Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan

dengan periode-periode sebelumnya. Maju tidaknya sebuah lembaga perkreditan desa salah satunya tergantung dari bagaimana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan, profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian *intern*.

Kasus kualitas laporan keuangan yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Ubud pada tahun 2022 yaitu LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud dirundung kasus karena kredit fiktif. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, dana nasabah yang ada di LPD tersebut mencapai Rp 5 Miliar lebih. Namun belakangan, nasabah kesulitan untuk melakukan pencairan dana mereka yang ada di LPD tersebut. Ada dugaan jika bendahara LPD melakukan kredit fiktif lebih dari Rp 1 miliar, namun oknum pengurus LPD yang terlibat tidak bisa mengembalikan dana secara penuh meskipun seluruh aset yang dimiliki sudah dijual, sedangkan nasabah LPD menuntut agar seluruh dana warga dikembalikan (Nusabali.com, 2022).

Kasus tersebut membuktikan bahwa sangat penting bagi LPD untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Adapun beberapa faktor yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan, profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi (SIA), dan sistem pengendalian *intern*. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tingkat pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami akuntansi baik sebagai perangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik.

Tingkat pemahaman akuntansi juga sangat diperlukan dalam proses membuat dan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas laporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih baik dan terhindar dari adanya kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Astrayani, 2017).

Pada umumnya, dalam membuat laporan keuangan seorang akuntan harus memahami isi dalam laporan tersebut. Jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suari (2019), Krisnawati (2019), Bhegawati (2021), Ardilia (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Ariantini (2023) menyebutkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pebriartini (2020), Yulianingsih (2019) dan penelitian yang dilakukan Iswara (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Wibowo (2011) salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah etika yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Frisch dan Huppenbauer (2014:23) mendefinisikan bahwa etika kepemimpinan adalah petunjuk atau kaidah yang mengatur sikap dan perilaku karyawan ketika bekerja didalam perusahaan. Tumasjan, et al., (2010:609) menyatakan bahwa etika kepemimpinan adalah aturan yang mengatur tindakan yang dilakukan oleh karyawan ketika berhubungan dan berinteraksi dengan pimpinan perusahaan. Sementara itu, Shin (2012:299- 312) mendefinisikan etika kepemimpinan adalah suatu aturan dan norma

yang mengatur komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika kepemimpinan adalah seperangkat aturan dan norma-norma yang berlaku didalam perusahaan yang menjadi pedoman dan aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Sehingga etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pimpinan dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Kepemimpinan diartikan bahwa kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam hal ini, etika akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga adanya etika kepemimpinan yang baik pada sebuah Lembaga atau perusahaan akan mampu memengaruhi kualitas keuangan serta laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019), Pebriartini (2020), Muliarta (2020), Bhegawati (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh yang positif antara etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuaba (2019), Yulianingsih (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Suari (2019) dengan memperoleh hasil bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pada suatu perusahaan.

Menurut Ardianingsih (2018:31) profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sebagai seorang yang profesional harus bertanggung jawab penuh dalam bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung

jawab diri sendiri maupun dengan ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Auditor yang profesional harus mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi. Menurut Arum Ardianingsih (2018:33) berpendapat perilaku profesional artinya memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi. Jika Profesionalisme yang dimiliki seorang *accounting* tinggi, maka kemungkinan besar laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih berkualitas, begitu juga sebaliknya jika *accounting* tidak profesional, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya pun cenderung kurang berkualitas karena *accounting*nya hanya sekedar menjalankan tugasnya tanpa didukung dengan profesionalismenya. Hasil penelitian Novitasari (2019), Miliani (2021), Pratiwi (2021), Sari, dkk. (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Asih (2022) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Iswara (2021) yang menemukan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi bisnis menjadi sarana penting untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan mendukung daya saing perusahaan dengan menyediakan informasi keuangan dan akuntansi bagi manajemen (Alsarayreh et al., 2011). Kasmir (2020:4) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan pengoperasian bisnis. James A. Hall (2018:17) mendefinisikan sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama yaitu: sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis setiap hari

dengan sejumlah dokumen untuk para pemakai seluruh organisasi, sistem pelaporan buku besar yang menghasilkan laporan keuangan tradisional dan sistem pelaporan manajemen yang menyediakan manajemen dengan internal laporan keuangan dengan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Pengolahan transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukannya, sistem informasi akuntansi menggunakan berbagai komponen yang dimilikinya seperti *hardware, software, brainware, prosedur, database* dan jaringan komunikasi (Susanto, 2017:9). Sistem informasi akuntansi tidak hanya mengolah data dalam jumlah besar untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan akan tetapi sistem informasi akuntansi juga berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap bagaimana pendokumentasian tersebut harus dilakukan oleh suatu organisasi, organisasi berorientasi laba atau bukan. (Susanto, 2017:22). Stair, 2010 mengatakan bahwa sebuah sistem informasi akuntansi harus fleksibilitas, efisiensi, mudah di akses dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang baik dan benar. Penelitian Prasiswa (2012) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi membantu dalam penyajian informasi laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Diah (2019), Suari (2019), Suardana (2019), Miliani (2021), Ardila (2021) dan juga penelitian Abriyanti (2022) yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun lain halnya dengan penelitian Imanuel (2021) dan Atharrizka, dkk. (2021) yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian *intern* merupakan hal yang sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan desa. Salah satu penerapan sistem

pengendalian intern adalah dengan adanya auditor internal. Menurut Mulyadi (2016:163), sistem pengendalian *intern* didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. Dengan adanya sistem pengendalian *intern* ini akan memberikan batasan tersendiri terhadap apa yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Menurut *Comite of Sponsoring Organization (COSO)* terdapat lima komponen *intern* yang terintegrasi diantaranya yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, serta (5) pemantauan. Komponen pengendalian *intern* dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal akan tercapai (Arens et al, 2012: 320 dalam Sudiarianti dkk., 2015). Pengendalian ini dapat diterapkan sesuai dengan peraturan- peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh setiap Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Jika sistem pengendalian internnya baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas karena adanya sistem pengendalian *intern* proses akuntansi dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi adanya penggelapan sehingga laporan keuangan mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan yang andal. Penelitian yang dilakukan oleh Iswara (2021), Daniarsa (2021), Abriyanti

(2022), Mahardika (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Risna (2023) menunjukkan bahwa pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk. (2021) dan penelitian yang dilakukan Asih (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian *intern* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan fenomena yang terjadi, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan tujuan memberikan penjelasan yang lebih beragam serta mengkaji ulang untuk mendapatkan hasil sesuai dengan teori yang digunakan dengan mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Ubud”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian yaitu:

- 1) Apakah Tingkat Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud?
- 2) Apakah Etika Kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud?
- 3) Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud?
- 4) Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud?

- 5) Apakah Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Etika Kepemimpinan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagi Pihak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi para peneliti selanjutnya dan juga referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan,

profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian *intern* terhadap kualitas laporan keuangan.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen LPD sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya supaya lebih etis dan professional dalam kualitas laporan keuangan serta dapat memberi masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat meningkatkan lagi dalam pembuatan laporan keuangan sehingga berkualitas.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Kelembagaan Lama (*old-institutional theory*)

Teori kelembagaan atau institusional theory adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan dapat bertumbuh dan berkelanjutan ketika berada dalam lingkungan yang kompetitif yang penuh dengan para pesaing, dan perusahaan memiliki kemampuan dalam menggandeng stakeholder. Adanya ketidakpuasan dan rasa tidak percaya terhadap teori neoklasik sehingga menimbulkan adanya konsep kelembagaan sebagai bagian dari ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum. Berdasarkan hal tersebut masuk kedalam inti pokok-pokok aliran ekonomi kelembagaan (Petrakis, 2020).

Dalam Hasibuan (dikutip oleh Santoso, 2008) menjelaskan pokok dari penjelasan kelembagaan bagaimana cara melihat ilmu ekonomi menjadi satu kesatuan dalam ilmu sosial, sebagai contoh psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum. Dalam teori kelembagaan terdapat dua teori kelembagaan diantaranya teori kelembagaan lama (*old institutional theory*) dan teori kelembagaan baru (*new institutional theory*). Di dalam teori kelembagaan lama, Nudilah (2016) menjelaskan dimana masyarakat mengidentifikasi organisasi berdasarkan norma dan nilai yang di gunakan dalam suatu organisasi. *Old institutional theory* Menurut Burn dalam Nudilah (2016) digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi dalam suatu organisasi,

objek analisis dalam teori kelembagaan lama adalah individunya sedangkan dalam teori kelembagaan baru yang di gunakan sebagai objek analisisnya adalah organisasi, sehingga penelitian ini menggunakan teori kelembagaan lama (*old institutional theory*) karena dalam penelitian ini meneliti karakter dari setiap individu yang bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan mulai dari tingkat pemahaman akuntansi, etika yang dimiliki pemimpin, profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern dalam menentukan kualitas suatu laporan keuangan serta pemahaman akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan itu sendiri.

### **2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat 1 Bali No. 972 Tahun 1984 yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 tertanggal 27 Januari dan telah diperbaharui kembali dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tanggal 12 September 2002 serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa yang menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup Krama Desa. Adapun keputusan Peralihan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Pasal 58 Tahun 1992 menyatakan bahwa Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kdedit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produk Desa (BKPD) dan lembaga lembaga lain yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) setelah memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Raperda tentang Lembaga Perkreditan Desa menjadi perda berdasarkan Keputusan DPRD provinsi Bali No 12 Tahun 2017 disana disebutkan sebagai lembaga perekonomian milik desa pekraman, LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi bagi pembangunan desa pekraman dan dijelaskan pula bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 disana disebutkan LPD sebagai Lembaga perekonomian milik desa pakraman, LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali berkembang sejak tahun 1985 yang dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa atas dasar pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) Desa Pakraman merupakan lembaga tradisional yang lebih mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama oleh Pakramannya (anggota Desa Pakraman).
- 2) Desa Pakraman mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati dan dipatuhi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Desa Pakraman merupakan suatu lembaga tradisional dan bersifat kelompok yang didasarkan kepada kondisi geografis Desa Pakraman.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No. 8 Tahun 2002 dicantumkan bahwa fungsi dan tujuan Lembaga Perkreditan Desa antara lain

mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan terarah serta menyalurkan modal yang efektif guna memberantas gadai gelap dan sejenisnya untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan sehingga dapat meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran serta peredaran uang di desa.

Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha, sebagai berikut:

- 1) Menerima atau menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- 2) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa.
- 3) Lembaga Perkreditan Desa dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada Kerjasama antara Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
- 4) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan, maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan modal
- 5) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Krama Desa dan dalam melaksanakan serta mengelola Lembaga Perkreditan Desa pengurus dapat mengangkat karyawan untuk membantu kegiatan operasional lembaga. Lembaga Perkreditan Desa dalam kegiatan usahanya menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat Desa Adat serta kegiatan jasa keuangan sejenis. Dapat disimpulkan di sini bahwa Lembaga

Perkreditan Desa merupakan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa Bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya tetap melakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa dilakukan oleh badan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Krama Desa melalui Paruman dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan dasar penhakuan *accrual basis* yang merujuk pada SAK ETAP.

### 2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Jonas dan Balanchett dalam Fadillah Amin (2019:156) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dapat dipahami serta dirancang tidak menyesatkan kepada penggunanya. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu membuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (Thomas, 2013:35). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi

keuangan yang dapat dipahami oleh para pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Peraturan Gubernur tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 30 ayat 2 mengenai jenis-jenis laporan LPD dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan Bulanan yang terdiri dari:
  - a) Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman
  - b) Neraca percobaan
  - c) Laporan Neraca
  - d) Laporan Laba Rugi
- 2) Laporan tiga bulanan yang terdiri dari :
  - a) Laporan penilaian kesehatan LPD
  - b) Laporan penilaian peringkat risiko LPD
- 3) Laporan Tahunan yang terdiri dari:
  - a) Laporan RK-RAPB tahunan LPD
  - b) Laporan pertanggung jawaban prajuru akhir tahun
  - c) Laporan pertanggung jawaban panureksa akhir tahun

Laporan diatas dibuat oleh Kepala LPLPD kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali. Laporan bulanan LPD yang terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan LPLPD dalam periode bulan sebelumnya, serta laporan perkembangan kinerja LPD secara kumulatif. Adapun laporan tiga bulan yang terdiri dari laporan bulanan ditambah dengan laporan keuangan yang berisikan laporan dana pemberdayaan LPD 5%, laporan perlindungan LPD, laporan dana penjaminan simpanan nasabah LPD dan laporan dana penyangga likuiditas LPD termasuk rekonsiliasi rekening masing-masing tabungan. Serta laporan tahunan yang bersumber dari laporan bulanan, tiga bulanan dan ditambah dengan laporan evaluasi perkembangan kinerja keuangan LPD termasuk dengan penanganan LPD yang bermasalah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih tentang manajemen dan kondisi LPD itu sendiri. Manajemen dapat menyampaikan informasi sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang dianggap berguna untuk pihak eksternal. Tujuan pelaporan keuangan antara lain memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya serta memberikan informasi tentang perusahaan selama satu periode seperti pembelanjaan kas, pinjaman, pembayaran kembali pinjaman dan transaksi modal serta faktor lain yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan.

Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik yang dimiliki oleh laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, laporan keuangan yang baik memiliki empat karakteristik, yaitu:

### 1) Relevan

Suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan dengan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

### 2) Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan dan tidak berbeda jauh.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan artinya informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya.

- a) Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam satu tahun.
- b) Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas).

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### **2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi**

Menurut Winkel dan Mukhtar (2004) dalam Sudaryono (2012:44), pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasi, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

Menurut Mahmudi (2010:124) Pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai

seperangkat pengetahuan (body of knowledge) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang yang dikatakan paham tentang akuntansi adalah orang yang mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan, hingga menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Perkreditasi Desa.

Menurut Yuliani (2010) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Adapun proses atau siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2010:318) adalah sebagai berikut:

1. Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi- transaksi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.
2. Analisis bukti transaksi dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3. Mencatat data transaksi seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
4. Mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (posting) dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan nama masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan posting.
5. Penerbitan laporan dan catatannya selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

Pemahaman merupakan suatu proses panjang dan bersifat individual. Pemahaman seseorang antara satu dengan lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan untuk memahami laporan keuangan yang disajikan. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akuntansi, prinsip nilai perolehan, prinsip realisasi, dan lainnya

### 2.1.5 Etika Kepemimpinan

Frisch dan Huppenbauer (2014:23) mendefinisikan bahwa etika kepemimpinan adalah petunjuk atau kaidah yang mengatur sikap dan perilaku karyawan ketika bekerja didalam perusahaan. Tumasjan, et al., (2010:609) menyatakan bahwa etika kepemimpinan adalah aturan yang mengatur tindakan yang dilakukan oleh karyawan ketika berhubungan dan berinteraksi dengan pimpinan perusahaan. Sementara itu, Shin (2012:299- 312) mendefinisikan etika kepemimpinan adalah suatu aturan dan norma yang mengatur komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa etika kepemimpinan adalah seperangkat aturan dan norma-norma yang berlaku didalam perusahaan yang menjadi pedoman dan aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Sehingga etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pimpinan dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Pemimpinan dikatakan beretika jika pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jika etika yang dimiliki seseorang pemimpin tinggi, maka bawahan cenderung akan mempercayai atasannya karena karyawan akan merasa bahwa atasan untuk menerapkan norma dan nilai masyarakat didalam perusahaan. Dalam melakukan pekerjaan laporan keuanganpun, karyawan tidak akan merasa terbebani atau diberatkan karena merasa bahwa apa yang mereka kerjakan dapat diterima oleh masyarakat luas karena tidak bertentangan dengan norma dan nilai. Di dalam hal ini, etika akan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam suatu organisasi.

Menurut Wirawan (2013:102) Etika Kepemimpinan adalah kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku yang secara normatif tepat melalui tindakan-tindakan dan hubungan interpersonal, dan promosi perbuatan seperti itu kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pembuatan keputusan. Prinsip etika kepemimpinan adalah pemimpin yang menghargai orang lain, melayani orang lain, pemimpin yang objektif, jujur, dan membangun komunikasi.

Seorang pemimpin yang beretika dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

1. Kepercayaan: apakah pemimpin itu bertanggung jawab dan apakah pemimpin paham tentang laporan keuangan
2. Keterbukaan: apakah pemimpin dapat menerima masukan dari pegawai atau bawahannya
3. Rangsangan kecerdasan: apakah pemimpin dalam pengambilan keputusan selalu membutuhkan laporan keuangan
4. Perhatian individu: apakah pemimpin hubungan pembinaan baik dengan bawahannya.

Maka dari itu etika kepemimpinan sangatlah diperlukan dalam suatu perusahaan. Jika pemimpin tidak beretika yang baik maka kemungkinan besar bawahannya tidak akan baik, begitu juga sebaliknya jika pemimpin menjalankan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan etika kepemimpinan maka otomatis bawahannya akan menjalankan tugas dengan baik. Jika semua bagian sudah melaksanakan kewajiban dengan baik maka otomatis akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

### 2.1.6 Profesionalisme

Istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang memiliki arti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan dan metode. Profesional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyanggah suatu profesi. Menurut Ardianingsih (2018:31) profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Sebagai seorang yang profesional harus bertanggung jawab penuh dalam bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun dengan ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Auditor yang profesional harus mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi. Alasan utamanya adalah mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang disajikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, profesionalisme adalah suatu sikap dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu sesuai dengan profesi yang digeluti dan selalu berpedoman pada etika.

Jika seseorang dapat memenuhi ketiga standar tersebut, yaitu memiliki pengetahuan profesional untuk melakukan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi dengan merumuskan standar-standar dalam bidang profesi yang bersangkutan, dan melaksanakan tugas profesionalnya dengan cara sebagai berikut, dia disebut profesional dan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan menurut Kristianto (2017:4). Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang memberi karakteristik suatu profesi. Seorang yang

profesional cenderung dipercaya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini tentu membuat pekerjaan yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, sehingga mendatangkan hasil yang sesuai dengan harapan. Begitupun dengan seorang accounting yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Accounting yang menjalankan tugas profesi dengan sungguh-sungguh maka kinerjanya akan optimal (Pratiwi, 2021).

Menurut Arum Ardianingsih (2018:33) berpendapat perilaku profesional artinya memenuhi ketentuan undang-undang dan aturan perundangan lainnya dan menghindari perbuatan yang merendahkan martabat profesi. Lima ciri pada profesionalisme menurut Suwirnadi (2019:81) yaitu:

- a. Profesionalisme memerlukan sifat kesempurnaan hasil (perfect result), yang bertujuan untuk meningkatkan mutu.
- b. Profesionalisme membutuhkan kesungguhan dan ketelitian kerja yang dapat diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan.
- c. Profesionalisme mewajibkan sifat ketekunan dan ketabahan, dalam artian sifat yang tidak pernah merasa puas dan mudah putus asa.
- d. Profesionalisme membutuhkan integritas tinggi yang tidak dapat tergoyahkan oleh keadaan dan godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup.
- e. Profesionalisme membutuhkan keutuhan fikiran dan perbuatan, sehingga terjaganya efektivitas kerja yang tinggi

### **2.1.7 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi**

Kasmir (2020:4) Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk

merencanakan, mengendalikan dan pengoperasian bisnis. James A. Hall (2018:17) mendefinisikan sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem utama yaitu: sistem pemrosesan transaksi yang mendukung operasi bisnis setiap hari dengan sejumlah dokumen untuk para pemakai seluruh organisasi, sistem pelaporan buku besar yang menghasilkan laporan keuangan tradisional dan sistem pelaporan manajemen yang menyediakan manajemen dengan internal laporan keuangan dengan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Susanto, 2017:52) Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Berikut ini merupakan komponen-komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi:

1) *Hardware* (perangkat keras)

*Hardware* yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi harus sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan atau dijalankan serta sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Kualitas komponen *hardware* yang digunakan harus asli (*original*) yang dapat diintegrasikan dengan *software* yang akan digunakan, spesifikasi *hardware* yang dipilih untuk sistem informasi akuntansi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan, situasi, kondisi, dan kebutuhan manajemen perusahaan, serta sumberdaya manusia yang tersedia di perusahaan ataupun instansi yang akan menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut.

2) *Software* (Perangkat Lunak)

Dalam memilih *software* apa yang akan dipakai lebih baik memilih dulu sistem operasi apa yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang dioperasikan. *Software* yang berkualitas adalah *software* yang berbasis jaringan yang banyak digunakan oleh orang dan perusahaan pada umumnya.

3) *Breainware* (Manusia)

Orang yang memiliki, membangun, dan menjalankan sistem informasi akuntansi merupakan pengertian dari *breainware*. Istilah orang diisi bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang tetapi orang yang berkompotendi bidangnya (memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan keahlian).

4) Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang harus di ikuti dan dibentuk atas dasar kesepakatan dengan penetapan dan pengesahan dilakukan oleh manajemen yang berwenang.

5) *Database*

Merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pemakai yang bersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau didalam perusahaan.

6) Jaringan *computer* dan telekomunikasi.

Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi data dalam sistem informasi akuntansi.

Penerapan sistem informasi akuntansi dibuat dan diarahkan untuk mendukung proses pembuatan laporan keuangan guna memenuhi kebutuhan informasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (Prasica, 2012). Penerapan sistem informasi akuntansi merupakan tahap implementasi sistem atau aplikasi berbasis keuangan yang mendukung proses pemenuhan informasi keuangan yang sesuai guna pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Silviana, 2014).

Menurut Romney & Steinbart (2018:10) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. Bagi suatu perusahaan, penerapan sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan (Susanto, 2017:8).

Menurut Romney & Steinbart (2018:11) ada fungsi atau peran sistem informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan utama tersebut yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang.

- b. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
- c. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi

### 2.1.8 Sistem Pengendalian *Intern*

Pengendalian meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya (Susanto, 2017:88). Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku (Susanto, 2017:95).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang *efektif* dan *efisien*, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan *asset* negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran serta menyediakan informasi keuangan yang andal, dan menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Pramudityo, 2017). Pengembangan unsur sistem pengendalian intern menurut (Indra, 2011) perlu

mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Adapun unsur-nsur sistem pengendalian intern ini mengacu pada unsur yang telah dipraktikan, yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap atau kesadaran organisasi dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

b. Penilaian Risiko

Untuk tujuan laporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

c. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen, kebijakan, dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif.

d. Informasi dan Komunikasi

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah kebijakan dan prosedur atas transaksi yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

e. Pemantauan

Proses penilaian kualitas kinerja diukur dari struktur pengendalian intern sepanjang waktu dan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil *audit* dan *review* lainnya.

Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, dan tindakan lain yang terkait. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah

- 1) Abriyanti (2022) yang meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian *Intern*, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Fungsi Badan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud”. Variabel independen yang digunakan adalah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian *Intern*, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Fungsi Badan Pengawasan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen pemanfaatan teknologi informasi dan fungsi badan pengawasan di penelitian sebelumnya.

- 2) Penelitian Asih (2022) yang meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian *Intern* dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kabupaten Bangli”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Etika Kepemimpinan, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian *Intern* dan Fungsi Badan Pengawas, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel etika kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan tingkat pemahaman akuntansi, dan pengendalian *intern* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen fungsi badan pengawasan di penelitian sebelumnya.
- 3) Pratiwi (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Profesionalisme, dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Marga”. Dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pemahaman Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Profesionalisme, dan Etika Kepemimpinan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan. Sedangkan profesionalisme dan etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD Kabupaten Marga. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi liner berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independent pemanfaatan fungsi badan pengawas di penelitian sebelumnya.

4) Iswara (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Profesionalisme, Sistem Pengendalian *Intern*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Profesionalisme, Sistem Pengendalian *Intern*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Tingkat Pemahaman Akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable profesionalisme dan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian *intern* dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi liner berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen pemanfaatan teknologi informasi di penelitian sebelumnya.

5) Penelitian Miliani (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Profesionalisme, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Peran Pengawas Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar”. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Tingkat Pemahaman Akuntansi, Profesionalisme, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Peran Pengawas Internal, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan profesionalisme, penerapan sistem informasi akuntansi (SIA), dan peran pengawas internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi liner berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen peran pengawas internal di penelitian sebelumnya.

- 6) Bhegawati (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawasan, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar”. Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawasan, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pemahaman Akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis

regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen fungsi badan pengawasan dan pengalaman kerja di penelitian sebelumnya.

- 7) Penelitian Pebriartini (2020) yang meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas dan Tingkat Pemahaman Akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen fungsi badan pengawas di penelitian sebelumnya.

- 8) Penelitian Muliarta (2020) yang meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Etika Kepemimpinan, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Fungsi Badan Pengawas, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen fungsi badan pengawas di penelitian sebelumnya.

9) Suari (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, dan tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen kualitas sistem informasi akuntansi dan fungsi badan pengawas di penelitian sebelumnya.

10) Yulianingsih (2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Tingkat

Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan etika kepemimpinan, pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda sedangkan perbedaannya yaitu terdapat variabel independen fungsi badan pengawas, pendidikan dan pengalaman kerja di penelitian sebelumnya. Untuk lebih lengkap dan lebih jelas mengenai ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.1 pada lampiran 1.